

---

**IMPLEMENTASI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT SEBAGAI  
PENDUKUNG TERWUJUDNYA E- GOVERNMENT DI DESA LAMATTI  
RIAJA**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai  
Email: sandiilmupemerintahan@gmail.com, al.amir.islam@gmail.com, jusniaty@gmail.com

---

**Artikel info**

**Artikel history:**

Received : 13-10-2020

Revised : 18-10-2020

Approved : 20-10-2020

**Keywords :** Community  
Information Group, ICT,  
E-Government.

**Kata kunci :** Kelompok  
Informasi Masyarakat,  
TIK, E-Government.

**Abstract :** *This study aims to determine the implementation of the Community Information Group as a support for the realization of E-Government in Lamatti Riaja Village, using descriptive research using a qualitative approach method, meaning that the data collected is not in the form of numbers, but the data comes from descriptive research and tend to use analysis. In the research results, the implementation of the Community Information Group is still lacking and has not been carried out as much as possible. which resulted in the dissemination of information not once and thoroughly, because there was no special social media for the Lamatti Riaja Village Community Information Group (KIM) in disseminating information.*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui , menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam hasil penelitian pengimplementasian Kelompok Informasi Masyarakat masih kurang dan belum terlaksana semaksimal mungkin, ini di lihat dalam pelayanan Kelompok Informasi Masyarakat pada Desa Lamatti Riaja masih melakukan sistem manual, melakukan sistem undangan print out dan sistem tempel, serta melakukan kunjungan langsung dalam pelayanan penyampaian informasi, yang mengakibatkan penyebaran informasi tidak sekali dan tidak menyeluruh, karena belum adanya sosial media khusus bagi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Lamatti Riaja dalam penyebaran informasi.



## **Pendahuluan**

Salah satu yang menjadi kebutuhan masyarakat sekarang yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menentukan keberhasilannya, sehingga penyebaran informasi harus mendapatkan prioritas, karena informasi sebagai sarana agar masyarakat dapat menerima apa yang di sampaikan pemerintah terhadap masyarakat, begitupun sebaliknya dalam hal ini komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam hidup bermasyarakat. Karena hal itu merupakan salah satu faktor terfatal untuk menciptakan interaksi sosial dan hubungan sosial (Hoeriah, 2019). Dilihat dari kondisi geografis Indonesia, menyebabkan kendala kesenjangan informasi dikalangan masyarakat perbatasan atau terpencil, sementara kebutuhan akan informasi merupakan hak seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Faktanya tidak semua masyarakat dapat menerima informasi dengan baik dan cepat karena rendahnya tingkat pengetahuan dan kemampuan dalam mendayagunakan teknologi informasi yang ada. Namun, dalam sustainable development goals terdapat 17 tujuan yang harus di terapkan di beberapa negara terkhusus di Indonesia, salah satu tujuannya terdapat pada point Sembilan yaitu Membangun infrastruktur yang tahan lama dan mendukung industrialisasi yang inklusif, berkelanjutan serta membantu perkembangan inovasi. Salah satu targetnya, secara signifikan meningkatkan akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi, berupaya untuk menyediakan akses yang universal dan terjangkau terhadap internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, sebagai maksud dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasal 1 dan 2.

Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai masih memiliki banyak tantangan untuk mencapai target global tersebut karena masih dalam melawan berbagai masalah informasi yang kompleks, seperti persuratan melalui sistem manual, penyampaian tidak menyeluruh dan tidak sekaligus, informasi sistem print out dan tempel, penyebaran informasi masih ada melakukan kunjungan langsung. Bukan hanya di sektor pemerintahan tetapi juga di sektor swasta sehingga perlu adanya persiapan yang terbaik dalam pemerintahan E-Government agar berjalan dengan baik dan semua dapat berubah, itu terjadi karena tidak adanya lulusan teknologi maupun informasi yang mahir dalam pengelolaan teknologi pada KIM yang pada akhirnya pelayanan cepat terhambat, meski sumber daya sudah mencapai tingkat minimum pada Desa lamatti Riaja, dilihat terdapatnya laptop dan jaringan internet pada Desa Lamatti Riaja sebagai pelengkap sumber daya dalam pendukung pelayanan E-Government.

Kondisi Desa Lamatti Riaja tidak sesuai harapan masyarakat bahwa Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan

mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik sesuai Inpres no 3 tahun 2003 terkait dari kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government tersebut. Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan dalam basis teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik sehingga berjalan secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan E-Government ini dapat dilakukan penataan dan manajemen proses kerja di lingkungan pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi atau media yang ada.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Melihat penyebaran informasi sangat di perlukan atau di butuhkan maka hadir Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang memiliki berbagai bidang diantaranya pengumpulan informasi dan penyebaran informasi pada Desa Lamatti Riaja sebagai jawaban atas semua kendala yang di hadapi dalam mewujudkan pemerintahan elektronik.

Tujuan pembangunan berkelanjutan ini merupakan agenda 2030 yang menjadi kerangka kerja global dalam pembangunan berkelanjutan. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut yaitu pelayanan pemerintahan elektronik (E-Government) secara cepat dan menyeluruh, yang mempunyai tantangan besar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang informasi yang semakin kompleks di Desa Lamatti Riaja, kecamatan Bulupoddo. Pembangunan desa dapat di dukung oleh Teknologi Informasi dan konsep E-Government yang menjadi pertimbangan utama bagi sektor pemerintah desa, melakukan perencanaan sistem informasi dalam rangka menyediakan input penting untuk memudahkan dalam proses penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi hasil pembangunan.

Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi bagian pelayanan pemerintah yang semakin besar pengaruhnya pada organisasi, profesional yang bekerja di dalamnya, serta hubungannya dengan publik. Rencana kebijakan untuk E-Government telah fokus pada isu-isu operasional internal, pemberian layanan jasa pemerintah dan teknologi itu sendiri yang secara masif dipercayakan pada Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai instrumen untuk menjadikan pemerintah yang lebih efektif, lebih bersahabat dan mudah dihubungi bagi masyarakat yang harus dilayani (Setiawan, 2020). Demikian dalam penerapan KIM Sebagai Pusat pengumpulan dan penyebaran informasi dalam Desa Lamatti Riaja di upayakan mampu menjadi penopang dalam terwujudnya E-Government. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi terhadap pemerintah dan masyarakat dengan mengangkat judul: "Implementasi Kelompok Informasi Masyarakat Sebagai Pendukung Terwujudnya E-Government di Desa Lamatti Riaja".

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dan proses yang lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara dan dokumentasi resmi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)**

Kelompok Informasi Masyarakat sebagai media bagi pemerintah maupun masyarakat untuk memperoleh pengetahuan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Indonesia memiliki beraneka ragam komunitas/kelompok yang memiliki fungsi KIM, yaitu dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk memperoleh atau mengakses informasi melalui teknologi. Setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam melakukan penyebaran informasi, baik dari potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alam yang mendukungnya. Masing-masing daerah perlu mengenal potensi kelompok masyarakat yang ada. Kelompok Informasi Masyarakat memiliki visi yang akan di capai yaitu Terwujudnya KIM yang inovatif dalam meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendayagunaan informasi dan komunikasi dalam rangka mencapai masyarakat informasi yang sejahtera.

Selain dari visi, kelompok informasi masyarakat memiliki misi yang harus di capai yaitu Mendorong tumbuh dan berkembangnya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) secara mandiri dan sebagai wahana informasi dalam masyarakat, dan meningkatkan peranan Kelompok Informasi Masyarakat dalam memperlancar arus informasi antar pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, serta meningkatkan kemampuan setiap anggota Kelompok Informasi Masyarakat dan masyarakat dalam mengakses, mengelola informasi dalam rangka meningkatkan dan mengatasi kesenjangan informasi, mengembangkan aktivitas KIM dalam memanfaatkan Teknologi dan KIM untuk penyebaran informasi guna meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat dan meningkatkan aktivitas KIM dalam menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kelompok Informasi Masyarakat merupakan kelompok yang secara mandiri dan kreatif melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap akses informasi dan komunikasi adapun tugasnya yaitu, Mewujudkan masyarakat yang aktif, peka dan memahami informasi, memberdayakan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat, mewujudkan jaringan informasi dan media komunikasi dua arah, menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain memberdayakan kelompok dalam mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan informasi.

### **B. E- Government**

Dalam pemerintahan yang berbasis teknologi sangatlah di perlukan yang namanya konsep, dimana Konsep E-Government dapat diartikan sebagai penggunaan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat (Supriyanto, 2016). Untuk mewujudkannya hal ini didukung penuh oleh pemerintah seperti yang disampaikan (Amiruddin, 2020) bahwa dewasa ini dalam menunjang terlaksanakannya

kegiatan pelayanan pemerintahan, pemerintah memfasilitasi dan mendorong penggunaan teknologi informasi yang disebut dengan elektronik government dengan tujuan mempermudah hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta kalangan yang berkepentingan.

Terdapat empat poin tujuan dalam pengembangan E-Government yaitu, Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi sekat waktu dengan biaya terjangkau oleh masyarakat, Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional, Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara, Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom (Presiden, 2003).

Menurut Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government dalam pencapaiannya perlu dilaksanakan melalui beberapa strategi yang berkaitan erat, yaitu:

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
- b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
- c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
- e. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.
- f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur (Barker et al., 1986).

### **C. Implementasi KIM terhadap Masyarakat**

Dalam era reformasi masih diperlukan keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). karena kondisi sebagian masyarakat yang belum memiliki kemampuan yang memadai untuk menelaah muatan informasi, baik karena faktor sosial (edukatif), ekonomis maupun kultural (Hoeriah, 2019). Sebagai Perkembangan Teknologi Informasi (TI) dewasa ini yang semakin pesat khususnya teknologi komputasi dan jaringan internet, penetrasi internet yang dilakukan pemerintah dan telkom bahkan sudah merambah sampai kepedesaan. Kemajuan teknologi ini, telah membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan yaitu telah dikembangkannya sistem pelayanan publik melalui jaringan internet yang dinamakan E- Government. (Supriyanto, 2016). Dengan adanya Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik semakin mendorong pentingnya kehadiran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media pelayanan informasi.

KIM berperan sebagai media forum, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki aktivitas mengikuti informasi dari berbagai sumber, kemudian mendiskusikan hasil monitoring, dan menyalurkan informasi kepada masyarakat sekitarnya dan lebih lanjut

mengimplentasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam informasi publik yang dimaksud adalah kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka secara umum dan disebarakan melalui media massa dan media internet (Rumata, 2017).

KIM diarahkan untuk mengumpulkan informasi dan menyebarkan informasi secara faktual terhadap masyarakat, karena Kelompok Informasi Masyarakat merupakan fasilitator informasi terhadap masyarakat, pusat informasi, pusat pengumpulan dan penyebaran informasi dan pusat perantara pelayanan informasi yang secara cepat. KIM terdiri dari sekelompok masyarakat yang memiliki komitmen bersama untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam memperoleh akses informasi. Hadirnya KIM di Desa Lamatti Riaja di upayakan mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat setempat agar informasi menyeluruh dan merata.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa terdapatnya Kelompok Informasi Masyarakat di Desa Lamatti Riaja hingga saat ini, sumber informasi yang masih rendah di dapatkan oleh masyarakat, meski media sudah mencukupi tingkat minimum dengan akses internet dan media teknologi pun tersedia, namun yang menjadi kendala yang menghambat informasi ini karena kurang aktifnya pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta tidak berjalannya strategi KIM yang sudah di tetapkan dan di sepakati bersama antara para pengurus KIM di Desa Lamatti Riaja. Dapat disimpulkan bahwa peranan KIM terhadap masyarakat sebenarnya sangat berdampak positif dikarenakan memiliki peranan terhadap masyarakat yaitu informasi dapat diketahui secara cepat melalui bidang penyebaran informasi pada Kelompok Informasi Masyarakat, namun faktanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya KIM tidak berjalan semaksimal mungkin, KIM menjalankan tugasnya hanya pada kegiatan tertentu yang dilakukan pemerintah Desa Lamatti Riaja.

#### **D. Implementasi KIM pada pemerintahan Desa Lamatti Riaja**

Media komunikasi informasi yang dimaksud dalam penelitian adalah Kelompok Informasi Masyarakat yang mampu memberikan informasi atau yang mampu menyampaikan penyebaran informasi pembangunan dari pemerintah maupun sebagai basis usaha peningkatan ekonomi kelompok sehingga fungsi media ini dapat berperan sebagai sarana diseminasi informasi, Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (Yalia, 2015).

Pemerintah telah memfasilitasi dan mendorong penunjang terwujudnya pemerintahan desa yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah desa selama jabatannya untuk menjalankan program. sehingga dalam menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis menggunakan beberapa model diantaranya, model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari E-Government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan public (Sosiawan, 2008).

Di suatu sisi untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik, yang diharapkan dapat menghasilkan layanan publik yang adil, transparan, efisien, dan manfaatnya dirasakan oleh semua warga masyarakat tanpa kecuali. Desakan masyarakat yang terus berkembang untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik adalah alasan yang kuat bagi para aparat pemerintahan untuk selalu memenuhinya (Sudarto, 2006). Berdasarkan hasil observasi yang

dilakukan penulis atau peneliti menunjukkan bahwa Desa Lamatti Riaja tingkat sarana sudah memadai di lihat terdapatnya laptop milik pemerintah desa, terdapatnya akses internet dan adanya wadah penyebaran informasi yaitu KIM, Informasi merupakan hasil data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih penting bagi pengguna dan lebih bermanfaat dalam mengambil keputusan. Adapun sifat-sifat Informasi harus berkualitas dan akurat bebas dari kesalahan karena sumber informasi yang sampai ke pengguna informasi kemungkinan besar banyak gangguan yang dapat merusak informasi. Tepat pada waktunya, berarti sampai informasi harus tepat waktu tidak boleh terlambat sebab informasi yang usang tidak ada artinya lagi. Informasi harus relevan sehingga informasi tersebut mempunyai nilai atau manfaat untuk penggunaannya. Informasi harus jelas, nilai informasi yang disajikan bisa dibaca dan dipahami dengan baik. Informasi harus lengkap, yaitu nilai informasi yang disajikan kepada user tersedia dengan lengkap.

Sistem informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi (Hartono & Mulyanto, 2010). Pemerintah desa belum bisa mengoptimalkan penyebaran informasi karena yang mengelola KIM ini tidak adanya pengurus yang berlatar belakang lulusan TIK, namun perangkat desa dan pengurus KIM sudah hampir rata pendidikan lulusan S1, sehingga sudah mampu menjalankan media sosial terkait pelayanan pemerintahan meski tidak semaksimal mungkin. Pelayanan yang dilakukan kebanyakan manual dan sistem tempel dan penyampaian informasi dengan mendatangi langsung yang mengakibatkan penyebaran informasi ini tidak sekali dan tidak merata.

Pemerintahan Desa Lamatti Riaja sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan program demi terwujudnya E-Government, yaitu memberi dukungan dan fasilitas pada semua pihak yang membentuk organisasi kepemudaan maupun kemasyarakatan. Pemerintah Desa Lamatti Riaja memberi dukungan terhadap KIM untuk bergabung pada kelompok terkait dengan media informasi yang ada di tingkat Kabupaten sebagai sumber acuan pada KIM Desa Lamatti Riaja dalam menjalankan tugasnya di tatanan Pemerintahan Desa Lamatti Riaja. Pengimplementasian KIM sebagai Pendukung terwujudnya E-Government pada Desa Lamatti Riaja belum sepenuhnya Sesuai dengan keinginan bersama, dan tidak sesuai dengan tujuan apa yang di harapkan pada tujuan pembangunan berkelanjutan point Sembilan tersebut dan bahkan tidak sesuai dengan Inpres no 3 tahun 2003 terkait dari kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government.

## **Kesimpulan**

Pengimplementasian Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai pendukung terwujudnya E sangat rendah atau kurang dilihat dari sistem manual, meski sarana dan prasarana memenuhi standar minimum, sehingga dalam mewujudkan SDGs poin sembilan di Desa Lamatti Riaja ini belum terlaksana semaksimal mungkin sesuai visi dan misi Kelompok Informasi Masyarakat, serta pengimplementasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan poin Sembilan. Dengan adanya KIM untuk mendukung pemerintahan berbasis Teknologi dalam penerapan pelayanan cepat dan menyeluruh bagi pemerintah dan masyarakat tidak terlaksana sesuai apa yang di harapkan sesuai Inpres No 3 Tahun 2003. Transparansi informasi dan kegiatan hanya diketahui oleh Perangkat Desa,

BPD, Tokoh masyarakat, akan tetapi masyarakat yang jauh dari lingkup kantor Desa Lamatti Riaja, tertinggal akan informasi.

Maka sebagai saran Agar pengimplementasian KIM berjalan sebagai pendukung terwujudnya E-Government dalam pelayanan pemerintah dan masyarakat, maka pemerintah desa sebaiknya melakukan beberapa hal, evaluasi KIM setiap bulannya. membuat website desa sebagai media informasi bagi masyarakat dan berupaya memperbaiki akses internet yang berada di pemukiman yang akses internetnya rendah serta Memberikan ketegasan pada KIM untuk menjalankan tugasnya.



### Bibliografi

- Amiruddin, Amiruddin, M. A. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Mendukung E-Government Di Desa Tongke- Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *Al Qisthi: Jurnal Sosial Dan Politik*, 23–31.
- Barker, W. C., Johnson, G. C., Hunt, L. T., George, D. G., & Tsugita, A. (1986). Similar domains in different proteins: detection and significance. *Tanpakushitsu Kakusan Koso. Protein, Nucleic Acid, Enzyme*, 29 Suppl, 54.
- Hartono, D. U., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi*, 6(1), 9–21.
- Hoeriah, R. (2019). *Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sultan ageng tirtayasa serang, maret 2018. Issue November*.
- Presiden. (2003). *Indonesia, R., Dan, K., Nasional, S., E-government, P., & Indonesia, P. R. Instruksi Presiden Republik Indonesia*.
- Rumata, V. M. (2017). The Public Information Compliance and Dissemination Among Urban and Rural Society. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(1).
- Setiawan, D. (2020). Evaluasi Purwarupa Sistem Informasi Program Pengembangan Desa Menggunakan System Usability Scale. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi (SENATIK)*, 3(1), 539–547.
- Sosiawan, E. (2008). A., “Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia (Challenges and Obstacles in Implementing E-Government in Indonesia).” *National Proceeding E-Indonesia, ITB, Bandung*, 46–59.
- Sudarto, Y. (2006). E-government dan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik. *Bandung: KNTIK*.
- Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1), 141–161.
- Yalia, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (Studi Pada Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) Di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat). *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 19(1), 123402.